

**PENJELASAN TENTANG PENDIDIKAN PROFESI GURU PAI
TAHUN 2021
MERESPON LAPORAN KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH
(19/5/2021)**

Merespon Laporan kepada Gubernur Jawa Tengah oleh seseorang yang tidak menyebutkan namanya , sebagaimana di bawah ini :

Laporan melalui LAPORGUB!

Yth. Pak Gubernur.. Mohon bisa menolong nasib kami Guru-guru Agama PNS di SMA/SMK Negeri diseluruh Jateng yang sampai detik ini belum bisa ikut PPG karena jadi anak tiri di Kemenag.

Bidang PAI memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kebijakan PPG telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 ttg Guru. Terkait dengan pembiayaan PPG sebagaimana diatur pada ps 66 ayat 2 PP 19/2017 bahwa Pembiayaan PPG dilakukan melalui APBN, APBD, dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Kementerian Agama telah melaksanakan Program Sertifikasi Guru PAI pada sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) baik PNS maupun Non PNS sejak tahun 2007 hingga saat ini.
 - a. Berdasarkan Data SIAGA (Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama), tercatat **jumlah GPAI SMA se Jawa Tengah, sebanyak 1.426 orang (355 orang GPNS, dan 1.007 orang GBPNS).**
 - b. **jumlah GPAI SMK se Jawa Tengah sebanyak 2.712 orang (214 GPNS , dan 2.381 orang GBPNS)**
 - c. **Dari jumlah 355 orang GPAI PNS di SMA se jawa Tengah, 309 orang (87,%) diantaranya telah bersertifikat , sedangkan 46 orang GPAI PNS (12%) belum bersertifikat**
 - d. **Dari jumlah 214 orang GPAI PNS di SMK se jawa Tengah, 178 orang (83,1%) diantaranya telah bersertifikat , sedangkan 36 orang GPAI PNS (16,82%) belum bersertifikat**
3. Tahun 2020 alokasi anggaran pendidikan di Kementerian Agama mengalami penurunan. Karena keterbatasan anggaran APBN yang diterima oleh Kementerian Agama RI , maka dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan Profesi Guru, Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI bersurat kepada Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi melalui surat No. B-1846/DJ.I/Dt.IV/HM.01/09/2020 tanggal 3 September 2020 perihal Permohonan Koordinasi Pelaksanaan PPG Guru PAI Tahun 2021 dengan Pemerintah Daerah .
Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tenga c.q. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Jawa Tengah, No. 11295/Kw.11.4/5/PP.00/09/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Permohonan Koordinasi Pelaksanaan PPG Guru PAI Tahun 2021 dengan Pemerintah Daerah. Di dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sbb

- a. Calon peserta PPG GPAI Tahun 2021 di Jawa Tengah berjumlah **673** orang (terdiri dari 13 orang jenjang SLB, 198 orang jenjang SMA, dan 462 orang jenjang SMK)
 - b. Keterbatasan anggaran Sertifikasi Guru yang dimiliki oleh Kemenag RI
 - c. Permohonan alokasi pembiayaan Sertifikasi Guru yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Surat dilampiri dengan data GPAI pada jenjang SLB, SMA, dan SMK se Jawa Tengah
4. Bidang PAI menindaklanjuti surat tersebut dengan melaksanakan koordinasi kepada Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Namun diperoleh jawaban bahwa Pemprov tidak cukup memiliki alokasi anggaran untuk pembiayaan Sertifikasi Guru PAI di Jawa Tengah.
 5. Koordinasi dengan Pemkab/Pemkot se Jawa Tengah juga dilakukan agar melakukan sharing anggaran pelaksanaan Sertifikasi Guru bagi GPAI yang diangkat oleh Pemda di jenjang SD dan SMP. Hasilnya ada 8 Kabupaten/kota yang merespon dengan mengalokasikan anggaran PPG bagi GPAI Tahun 2021 (Kab. Sukoharjo, Kota Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Purbalingga, Kab. Semarang, Kota Pekalongan, Kab. Wonogiri, dan Kota Salatiga) yang telah mengalokasikan anggaran APBDnya guna pembiayaan Sertifikasi Guru PAI di Jawa Tengah.

An. Kepala
Ka. Bidang PAI



H. IMAM BUCHORI